

Menakar Demokrasi Lokal: Antara Uang dan Kekerabatan dalam Kontestasi Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah

Annisah Putri^{1*}, Hazdi Syah Putra², Maghfira Faraidiany³, Iqbal Ahmady⁴, Ubaidullah⁵

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala, Jl. Tgk, Tanoh Abee,
Darussalam, Banda Aceh, Indonesia 24415.

Email Korespondensi: annisahputri@usk.ac.id

Abstrak

Pemilihan Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah mencerminkan dinamika demokrasi lokal yang kompleks, di mana praktik politik uang dan politik kekerabatan menjadi dua elemen dominan yang saling memperkuat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik politik uang dan politik kekerabatan memengaruhi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan lokal di Kabupaten Aceh Tengah. Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah teori politik uang dan politik kekerabatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap informan sampel dari 5 Kampung di Kabupaten Aceh Tengah. Temuan menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya menjadi strategi elektoral utama, tetapi juga menurunkan kualitas kepemimpinan dan memperlemah akuntabilitas publik. Sementara itu, politik kekerabatan memperkuat eksklusivitas kekuasaan melalui mobilisasi jaringan sosial berbasis hubungan darah. Ketika keduanya berjalan secara simultan, pemilihan Reje Kampung cenderung menghasilkan kepemimpinan yang tidak representatif dan memperkuat oligarki lokal. Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan politik, dan kebiasaan sosial lokal menjadi pendorong utama suburnya praktik ini. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan struktural dan kultural dalam merespons tantangan demokrasi lokal serta merekomendasikan penguatan peran lembaga adat untuk memperbaiki integritas pemilihan di tingkat kampung.

Kata kunci: Politik Uang; Politik Kekerabatan; Reje Kampung.

Measuring Local Democracy: Between Money and Kinship in the Village Reje Contest in Central Aceh District

Abstract

The election of Reje Kampung in Central Aceh Regency reflects the complex dynamics of local democracy, where the practices of money politics and kinship politics emerge as two dominant and mutually reinforcing elements. This study aims to analyze how these practices influence the quality of democracy and local governance in Central Aceh Regency. The theoretical framework employed includes theories of money politics and kinship politics. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through direct observation and in-depth interviews with selected informants from five villages in the region. The findings reveal that money politics not only serves as the primary electoral strategy but also undermines leadership quality and weakens public accountability. Meanwhile, kinship politics reinforces the exclusivity of power through the mobilization of blood-based social networks. When both practices operate simultaneously, Reje Kampung elections tend to produce unrepresentative leadership and strengthen local oligarchies. Economic factors, low levels of political education, and prevailing local social habits are identified as the main drivers of these entrenched practices. This research highlights the importance of structural and cultural approaches in addressing the challenges of local democracy and recommends strengthening the role of traditional institutions to enhance the integrity of village-level elections.

Keywords: Money Politics; Kinship Politics; Reje Kampung.

How to Cite: Putri, A., Putra, H. S., Faraidiany, M., Ahmady, I., & Ubaidullah, U. (2025). Menakar Demokrasi Lokal: Antara Uang dan Kekerabatan dalam Kontestasi Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah. *Empiricism Journal*, 6(2), 256–264. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.2859>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.2859>

Copyright© 2025, Putri et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Di Aceh Tengah, kepala desa dikenal dengan sebutan "Reje Kampung," yang memiliki kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan kampung dan bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat. Meskipun pemilihan Reje Kampung dilakukan secara langsung dan demokratis, prosesnya kerap kali

diwarnai oleh praktik politik uang dan dominasi politik kekerabatan. Fenomena ini tidak hanya merusak semangat demokrasi, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya sistem pemerintahan yang eksklusif, tidak akuntabel, dan jauh dari prinsip good governance. Fenomena politik uang dan politik kekerabatan dalam pemilihan Reje Kampung mencerminkan bentuk-bentuk penyimpangan dalam demokrasi lokal yang berdampak pada kualitas pemerintahan kampung. Politik uang (money politics) merupakan pemberian materi atau janji untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat (Aspinall, 2014; Qulsum, 2020). Praktik ini bukan sekadar pelanggaran etika pemilu, tetapi juga representasi nyata dari ketimpangan sosial dan politik yang berakar pada struktur masyarakat lokal. Sementara itu, politik kekerabatan (nepotisme elektoral) menunjukkan kecenderungan pemilih memilih calon berdasarkan hubungan darah atau sosial, bukan pada kapasitas dan integritas (Berenschot, 2018). Keduanya menjadi tantangan besar dalam membangun demokrasi partisipatif yang berorientasi pada kualitas kepemimpinan.

Pemilihan Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2022 menjadi studi kasus penting karena melibatkan kedua praktik ini secara simultan. Berbagai pihak menyatakan bahwa hampir seluruh kandidat menggunakan politik uang, namun kemenangan justru diraih oleh calon yang memiliki jaringan kekerabatan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekeluargaan menjadi elemen kunci dalam mendukung strategi politik uang. Bahkan, keterlibatan keluarga tidak hanya bersifat simbolik, tetapi telah terstruktur dalam bentuk mobilisasi suara, penggalangan dana, hingga penentuan posisi strategis dalam pemerintahan kampung pasca-pemilihan. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana politik uang dan politik kekerabatan memengaruhi dinamika pemilihan Reje Kampung serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola kampung. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji relasi antara struktur sosial masyarakat lokal, sistem nilai yang berkembang, dan praktik politik yang terjadi di tingkat akar rumput. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan demokrasi lokal di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik budaya yang kuat seperti Aceh.

Penelitian-penelitian terdahulu (Maemunah, 2022; Sitta Al Savira, 2016; Yola Dwi Sapitri, 2021) telah banyak mengkaji fenomena politik uang dalam konteks pemilihan kepala desa, dengan fokus pada persepsi masyarakat, faktor pendorong, dan bentuk praktik yang terjadi. Namun demikian, studi-studi tersebut umumnya membahas politik uang secara terpisah dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan fenomena politik kekerabatan, yang dalam kenyataan sosial justru sering berjalan bersamaan dalam proses elektoral lokal. Kekosongan ini menjadi celah penting yang belum banyak diangkat oleh penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks pemilihan Reje Kampung di wilayah Aceh Tengah, yang memiliki kekhasan budaya tersendiri melalui hukum adat Gayo dan peran kekerabatan dalam struktur sosial masyarakat. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menganalisis secara simultan bagaimana praktik politik uang dan jaringan kekerabatan bekerja secara sinergis dalam menentukan hasil pemilihan Reje Kampung, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan kampung.

Politik uang merupakan salah satu bentuk distorsi dalam proses demokrasi elektoral yang ditandai oleh adanya pertukaran suara pemilih dengan imbalan materi. Edward Aspinall (2014) mendefinisikan politik uang sebagai praktik jual beli suara, di mana pemilih memberikan dukungan bukan berdasarkan pertimbangan rasional atas visi, integritas, atau rekam jejak calon, melainkan atas dasar keuntungan material yang diterima. Fenomena ini merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti keadilan elektoral dan kesetaraan politik, serta cenderung melahirkan kepemimpinan yang tidak akuntabel dan berorientasi pada pengembalian modal politik. Dalam kerangka teori pertukaran sosial, Blau (1964) dan Coleman (1990) menjelaskan bahwa praktik politik uang merupakan bentuk relasi timbal balik, di mana pemilih bertindak rasional untuk memperoleh manfaat langsung, meskipun mengorbankan kepentingan jangka panjang kolektif. Studi kontemporer seperti yang dilakukan oleh Tapsell (2022) juga menunjukkan bahwa politik uang semakin tersebar luas di tingkat lokal seiring melemahnya fungsi partai dan rendahnya pendidikan politik masyarakat. Hal ini akan berpengaruh pada keberlanjutan demokrasi di Indonesia (Simatupang, 2018).

Sementara itu, politik kekerabatan merujuk pada praktik rekrutmen politik yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan, baik melalui ikatan darah, perkawinan, maupun jejaring sosial tradisional. Anjani (2021) menyatakan bahwa politik kekerabatan tidak hanya bersifat genealogis, melainkan juga dikonstruksi secara sosial dalam konteks budaya lokal dan struktur patron-klien. Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2009) menegaskan bahwa jejaring kekerabatan memainkan peran strategis dalam membangun dukungan elektoral melalui mobilisasi suara, penyebaran informasi politik, dan pemberian legitimasi sosial kepada kandidat. Praktik ini, menurut Prihatmoko dan Maharani (2021), berpotensi menciptakan dominasi politik keluarga atau oligarki lokal, yang pada akhirnya menghambat regenerasi politik dan meminggirkan calon potensial berbasis meritokrasi. Ketika pemilihan lebih dipengaruhi oleh kedekatan kekerabatan dibandingkan kapasitas personal, maka kualitas kepemimpinan yang lahir dari proses demokrasi tersebut menjadi dipertanyakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak dari praktik politik uang dan politik kekerabatan dalam proses pemilihan Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah. Fenomena ini dinilai telah memengaruhi kualitas demokrasi lokal serta legitimasi pemimpin yang terpilih. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik-praktik tersebut, baik yang bersumber dari dinamika sosial, budaya, ekonomi, maupun kelemahan sistem pengawasan pemilihan di tingkat kampung. Dengan memahami akar permasalahan secara komprehensif, penelitian ini selanjutnya akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat integritas pemilihan Reje Kampung, sekaligus mendorong terciptanya proses demokrasi yang lebih transparan, adil, dan partisipatif di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi faktual dari suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya (Neuman, 2014). Sementara Creswell & Poth (2018) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif sangat tepat untuk digunakan untuk menyajikan pemahaman yang realistis terhadap suatu peristiwa dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan kualitatif deskriptif dapat memberikan pemahaman kontekstual yang tajam terhadap suatu fenomena sosial tanpa beban interpretasi teoretis yang mendalam. Dengan landasan pada pengalaman dan persepsi partisipan, pendekatan ini mampu menghasilkan gambaran faktual yang akurat, seperti dalam pemilihan *Reje Kampung*.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel lokasi penelitian di 5 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah; yaitu Kecamatan Ketol, Rusip Antara, Lut Tawar, Linge dan Bintang. Masing-masing kecamatan diambil sampel 1 kampung untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, diantaranya Kampung Alu Lintang, Kuala II, Serempah, Kenawat, dan Lut Jaya. Perwakilan dari masing-masing Kampung diambil sebagai subjek penelitian yang berfungsi menjadi responden untuk memperoleh data primer Waktu penelitian berlangsung sejak Januari hingga September 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada teknik pengumpulan data kualitatif pada umumnya, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi (Patton, 2015). Dalam pelaksanaannya, mengambil panduan dari Creswell & Poth (2018), peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yang bersifat terbuka serta fleksibel, dengan tujuan untuk menggali informasi dan makna subjektif dari pengalaman para informan kunci yang terdiri dari Reje Kampung terpilih, calon Reje yang kalah, tokoh masyarakat, akademisi, dan pengamat politik lokal. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai praktik politik dalam pemilihan Reje Kampung, terutama dalam aspek transaksional dan hubungan kekerabatan. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kontekstual dan autentik.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian kualitatif karena berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi informasi bermakna yang dapat menjawab

pertanyaan penelitian. Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), data kualitatif dianalisis melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara simultan, antara lain proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang semuanya dilakukan dalam bentuk naratif dan tidak menggunakan angka. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap dinamika politik lokal dalam pelaksanaan pemilihan Reje Kampung secara holistik dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak *Money Politics* dan Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah

Menghasilkan manajemen pemerintahan yang KKN

Hasil temuan menunjukkan bahwa politik uang dan politik kekerabatan tidak hanya menjadi strategi pemenangan kandidat, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap integritas pemerintahan kampung. Fenomena politik uang dan politik kekerabatan yang dijadikan sebagai strategi kemenangan bagi calon reje kampung saat ini, berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan kampung. Hal ini dikarenakan pengisian jabatan pemerintah kampung berasal dari proses persaingan yang tidak adil (*fair competition*), sehingga memungkinkan menghasilkan pejabat kampung yang nantinya akan mementingkan dirinya sendiri. Salah satu tokoh masyarakat di Kampung Alu Lintang, Musa Husin, menyatakan bahwa pola penyebaran politik uang ini bukan hanya berbentuk uang, melainkan barang, jabatan dan lain-lain. Ini sangat berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat kampung. Proses demokrasi di tingkat lokal akan kehilangan substansinya karena kandidat tidak bersaing berdasarkan gagasan, visi, atau kompetensi, melainkan kemampuan finansial. Masyarakat pun cenderung melihat pemilu sebagai kesempatan memperoleh keuntungan langsung, bukan sebagai sarana memilih pemimpin terbaik (Aminuddin, 2018). Dampak politik uang dalam konteks ini selaras dengan temuan Aspinall (2014) yang menekankan bahwa politik uang akan menciptakan pola hubungan patron-klien yang merusak akuntabilitas vertikal antara pemimpin dan warga. Kandidat yang menginvestasikan sumber daya besar dalam kampanye cenderung mengutamakan pengembalian modal dibandingkan pelayanan publik. Hal ini juga terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan warga Kampung Kuala II bernama Rahmani yang mengatakan bahwa Reje kampung saat ini sangat mementingkan kepentingannya di kegiatan-kegiatan yang menguntungkan, sehingga masyarakat pun sulit untuk menjumpai Reje tersebut. Realitas politik uang ini pada akhirnya, mengakibatkan kandidat dengan integritas tinggi namun minim sumber daya finansial akan kesulitan bersaing. Ini mempersempit ruang kontestasi politik yang adil dan berimbang, sehingga memperkuat oligarki lokal. Kemudian, dampaknya akan lebih terasa pada pelemahan akuntabilitas di daerah, sebab kepala daerah yang merasa berutang kepada sponsor lebih loyal pada pemberi dana daripada pada rakyat. Hal ini mengurangi akuntabilitas vertikal antara pemimpin dan masyarakat, serta memperlemah fungsi kontrol sosial.

Fenomena ini menegaskan pandangan Abdurrohman (2021) tentang hubungan antara politik uang dan korupsi struktural di tingkat lokal. Pemerintahan yang lahir dari transaksi elektoral cenderung eksklusif dan kurang responsif terhadap kebutuhan warganya. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan dan pemerintahan. Adapun dampak politik uang bagi masyarakat yang paling utama adalah merusak budaya dan nilai sosial kedaerahan (Hasan, 2023). Selain politik uang, politik kekerabatan juga memainkan peran dominan dalam pemenangan calon Reje Kampung. Dalam banyak wawancara, ditemukan bahwa keterlibatan keluarga tidak hanya bersifat simbolik, tetapi aktif mengatur strategi dan mobilisasi suara. Muhammad Sholeh seorang informan dari pihak keluarga calon Reje Kampung Kenawat menyebutkan, "Uang merupakan suatu kewajiban, tetapi ikatan saudara menjadi faktor penentu di masyarakat."

Merusak Paradigma Demokrasi Kebangsaan

Politik uang dan politik kekerabatan dalam pemilihan Reje kampung memiliki dampak yang sangat merusak terhadap paradigma bangsa dan tatanan kehidupan berbangsa di tingkat yang paling dasar. Praktik ini sudah menggerus nilai-nilai demokrasi dalam pemilu sebagai instrument utama demokrasi, yang seharusnya mengedepankan kualitas pemimpin

dan kapasitas calon pemimpin. Secara teoritis, demokrasi menuntut partisipasi publik yang bebas dan rasional, persaingan yang adil (*fair competition*), dan akuntabilitas pemimpin terhadap konstituen. Namun, prinsip-prinsip dasar demokrasi rusak ketika politik kekerabatan dan politik uang menjadi dominan, karena politik uang merusak transparansi pemilu, menurunkan kredibilitas hasil pemilu, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik (Ramadhani, 2025). Ketika uang sudah menjadi penentu dalam pemilihan Reje kampung masyarakat cenderung mengabaikan aspek kompetensi, integritas, dan visi misi calon pemimpin. Hal ini menciptakan pola pikir pragmatis di masyarakat yang menganggap bahwa suara mereka dapat dibeli sehingga menghilangkan esensi dari demokrasi yang sebenarnya. Akibatnya, pemimpin yang terpilih bukanlah yang terbaik untuk pemimpin kampung, melainkan yang memiliki banyak uang. Dampak jangka panjang yang lebih di khawatirkan adalah rusaknya mental dan karakter generasi muda di kampung. Mereka menyaksikan dan tumbuh dalam lingkungan yang menganggap politik uang sebagai hal yang wajar, sehingga nilai-nilai kejujuran, integritas dan profesionalisme dalam kepemimpinan menjadi terabaikan. Paradigma ini akan terus berlanjut dan semakin mengakar jika tidak segera di atasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan pondasi di tingkat kampung.

Hal ini menguatkan argumen Berenschot (2018) bahwa jaringan kekerabatan di Indonesia kerap menjadi institusi informal yang lebih kuat dari partai politik dalam konteks lokal. Mobilisasi berdasarkan hubungan darah menciptakan fenomena yang disebut sebagai '*familial democracy*' di mana loyalitas terhadap keluarga melebihi pertimbangan rasional terhadap kompetensi calon. Namun, dampak negatif dari dominasi kekerabatan ini cukup serius. Seorang warga Kampung Serempah, Dewi Susanti, menyatakan bahwa Reje Kampung harusnya milik masyarakat Kampung, namun nyatanya mereka mementingkan keluarga atau kerabatnya dibandingkan masyarakat lain, bahkan masyarakat jika ingin bertemu Reje harus melalui keluarga terlebih dahulu. Ini mencerminkan apa yang disebut Robison & Hadiz (2014) sebagai "oligarki lokal" yang mempersempit ruang partisipasi politik warga non-kerabat. Jika Robinson & Hadiz menekankan konsep oligarki pada penumpukan kekayaan dan kekuasaan politik, Winters (2014) lebih fokus terhadap peranan aktor yang memiliki akses kontrol terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan, sehingga konsep Winters lebih tepat untuk menggambarkan fenomena Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah.

Faktor-faktor Penyebab Politik Uang dan Kekerabatan

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kuatnya praktik politik uang dan politik kekerabatan dalam pemilihan Reje Kampung di Kampung Kuala II, yaitu kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya pendidikan politik, serta kebiasaan sosial yang telah mengakar. Pertama, kondisi ekonomi yang memprihatinkan menjadi latar belakang utama penerimaan politik uang oleh warga. Banyak masyarakat yang berada pada lapisan ekonomi menengah ke bawah, dengan penghasilan tidak menentu dan kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam situasi ini, bantuan berupa uang tunai, sembako, atau fasilitas lainnya dari calon Reje Kampung menjadi daya tarik kuat yang sering kali mengalahkan pertimbangan rasional terhadap kualitas dan kapasitas calon. Seorang informan dari Kampung Lut Jaya, Hayati, mengungkapkan bahwa ia merasa rugi jika tidak menerima uang dari calon, karena kondisi ekonominya yang terbatas. Hal ini mencerminkan pola *electoral clientelism* sebagaimana dikemukakan oleh Kitschelt & Wilkinson (2007), di mana ketergantungan ekonomi terhadap elite lokal mendorong terjadinya pertukaran suara dengan imbalan materi. Persaingan elektoral yang ketat mendorong kandidat untuk menggunakan strategi klientelistik, termasuk menjanjikan pekerjaan kepada pendukung sebagai kompensasi atas dukungan politik (Pierskalla & Sacks, 2019). Menariknya, faktor ekonomi tidak hanya berada di posisi masyarakat saja, tetapi juga berpengaruh pada para kontestan pemilihan. Penelitian oleh Virananda (2021) menemukan bahwa dana kampanye memiliki dampak yang signifikan terhadap elektabilitas kontestan di Pemilu. Dampak jangka panjangnya akan melahirkan budaya korupsi bagi kontestan yang terpilih dikarenakan besarnya biaya kontestasi yang harus mereka keluarkan. Di Indonesia, ditemukan banyak kasus korupsi yang terjadi dihubungkan dengan beban biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah (Agustino, 2020). Ketika kepala daerah terjerat korupsi setelah terpilih, publik menjadi

skeptis terhadap proses demokrasi. Ini dapat menurunkan partisipasi pemilih, memperkuat apatisme politik, dan mengancam legitimasi institusi demokrasi.

Kedua, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat juga berkontribusi besar terhadap suburnya praktik ini. Minimnya pendidikan formal serta kurangnya sosialisasi politik dari pihak berwenang menyebabkan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya menjaga integritas dalam pemilihan. Sebagian besar warga hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat dasar, yang berdampak pada rendahnya literasi politik. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh oleh iming-iming materi tanpa memahami konsekuensi jangka panjang dari praktik politik uang. Akademisi Aceh, Akbar Saradi menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya belum mampu membedakan antara pemilihan yang ideal dan praktik transaksional yang merusak prinsip demokrasi. Data dari survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, sekitar 35% responden menentukan pilihannya karena uang, meningkat dari 28% pada Pemilu 2019 (Indikator, 2024). Ketiga, kebiasaan sosial dan tradisi turut memperkuat normalisasi politik uang. Dalam konteks lokal Kampung Kuala II, pemberian uang atau bantuan dianggap sebagai bagian dari tradisi kampung yang sudah lumrah. Seorang warga bernama Rahmandi bahkan menyatakan bahwa tanpa politik uang, pemilihan terasa "biasa-biasa saja". Pandangan semacam ini menunjukkan bahwa praktik transaksional telah tertanam dalam budaya politik masyarakat dan membentuk ekspektasi sosial tertentu terhadap proses pemilihan. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang tidak menerima imbalan bahkan meminta kompensasi dalam bentuk jabatan atau proyek apabila calon yang mereka dukung terpilih.

Selain politik uang, dominasi politik kekerabatan juga menjadi persoalan krusial dalam pemilihan Reje Kampung. Dukungan dari keluarga besar dan jaringan kerabat menjadi kekuatan politik yang sangat menentukan kemenangan calon, terlepas dari kualitas kepemimpinannya. Kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan luas memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kontestasi karena adanya loyalitas sosial yang kuat. Fenomena ini mencerminkan pola patronase-klientelisme di mana hubungan sosial menjadi instrumen utama dalam mobilisasi politik. Akibatnya, pemilihan tidak lagi menjadi ajang seleksi kepemimpinan berbasis kompetensi dan visi, melainkan ajang konsolidasi kekuasaan dalam lingkup keluarga. Dalam jangka panjang, praktik ini berpotensi membentuk sistem oligarki lokal yang menutup ruang partisipasi politik bagi warga yang tidak memiliki afiliasi kekerabatan dengan elite penguasa. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa politik uang dan politik kekerabatan tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat. Kandidat dengan modal kekerabatan yang kuat lebih mudah menyebarkan praktik politik uang karena memiliki jaringan distribusi yang terpercaya. Sebagaimana dikemukakan oleh calon Reje terpilih di Kampung Kuala II, yang menyatakan bahwa keluarga dan kerabat sangat berperan penting untuk kemenangan, tetapi tidak cukup hanya dengan keluarga saja, harus siap dengan uang, dan begitu juga sebaliknya. Model ini mirip dengan teori "*hybrid political system*" Carothers (dalam Towett & Kungu, 2020) yang menyatakan bahwa sistem politik di banyak negara berkembang mencampurkan elemen demokrasi formal dengan praktik informal berbasis patronase dan kekerabatan. Praktik informal seperti patronase dan klientelisme seringkali berjalan berdampingan dengan institusi demokrasi formal, menciptakan sistem politik yang kompleks dan seringkali menghambat partisipasi politik yang inklusif. Hal ini menjelaskan mengapa upaya reformasi sering kali gagal di tingkat lokal jika tidak menyentuh akar budaya dan struktur sosial yang menopang praktik tersebut.

Dalam konteks pemilihan Reje Kampung, politik uang dan politik kekerabatan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling memperkuat. Keluarga besar calon tidak hanya memberikan dukungan moral dan logistik, tetapi juga terlibat dalam distribusi uang dan barang kepada pemilih. Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga calon menjadi perantara utama dalam praktik politik uang. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa politik lokal di tingkat desa masih didominasi oleh relasi transaksional dan ikatan sosial berbasis kekeluargaan, bukan oleh mekanisme demokrasi prosedural yang sehat. Ditambah lagi, pemilihan di tingkat lokal di Indonesia seringkali diwarnai dengan peranan dinasti politik yang dominan (Rusnaedy, 2022). Kombinasi antara politik uang dan politik kekerabatan dalam pemilihan Reje Kampung membawa implikasi serius terhadap demokrasi lokal.

Pemilihan menjadi tidak kompetitif dan hanya menguntungkan kandidat dengan sumber daya besar dan jaringan keluarga kuat, masyarakat menjadi apatis dan cenderung pragmatis dalam memilih, serta hasil pemilihan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak mampu dan tidak akuntabel akan menjadi catatan serius yang harus dihadapi dari permasalahan tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya erosi nilai-nilai demokrasi di tingkat akar rumput. Dalam konteks hukum adat Gayo, praktik politik uang dan nepotisme bertentangan dengan prinsip "*reje musuket sipet*" (pemimpin yang adil dan bijaksana), yang selama ini menjadi fondasi normatif dalam tata kelola kampung.

Untuk mengatasi problematika politik uang dan politik kekerabatan dalam pemilihan Reje Kampung di mayoritas wilayah Kabupaten Aceh Tengah, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai aktor lokal serta instrumen sosial dan hukum yang relevan. Salah satu langkah strategis yang direkomendasikan adalah revitalisasi peran lembaga adat, khususnya sarak opat dan tokoh adat, guna menghidupkan kembali fungsi kontrol sosial dalam proses pemilihan. Peran adat yang kuat dapat menjadi penyeimbang terhadap praktik menyimpang dan memberikan legitimasi moral terhadap proses demokrasi di tingkat kampung. Selain itu, penting untuk mengembangkan pendidikan politik berbasis komunitas, dengan melibatkan Komisi Independen Pemilihan (KIP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), serta tokoh-tokoh lokal dalam upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan. Pendidikan politik tidak efektif jika hanya top-down. Keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga lokal, termasuk KIP dan DPMK, mampu membangun kesadaran politik yang kontekstual dan berkelanjutan (Mawaddah, 2020).

Langkah berikutnya adalah penegakan sanksi melalui pengintegrasian antara sanksi adat dan regulasi formal dalam menindak pelaku praktik politik uang dan nepotisme. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memperkuat norma sosial yang menolak politik transaksional. Di samping itu, penguatan transparansi dan partisipasi publik juga menjadi kunci dalam mendorong tata kelola pemerintahan kampung yang bersih dan akuntabel. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan serta pengelolaan pemerintahan kampung dapat membangun budaya politik yang lebih sehat dan partisipatif. Keempat strategi ini perlu dijalankan secara sinergis untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih demokratis dan berintegritas di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Fenomena politik uang dan politik kekerabatan dalam pemilihan Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah bukan hanya mencerminkan persoalan elektoral semata, melainkan persoalan struktural dalam demokrasi lokal. Praktik ini menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat desa masih jauh dari ideal, dan membutuhkan intervensi yang berbasis budaya, pendidikan, dan penguatan institusi lokal. Perubahan tidak akan terjadi secara instan, namun melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga adat, arah perubahan menuju demokrasi desa yang sehat dan berintegritas masih sangat mungkin untuk diwujudkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam pemilihan Reje Kampung di Kabupaten Aceh Tengah, telah terjadi secara sistematis, mencakup seluruh tahapan pemilihan. Politik uang tidak hanya berfungsi sebagai strategi elektoral, tetapi telah menjadi bagian dari budaya politik yang diterima masyarakat. Fenomena ini memperkuat keberlakuan teori patronase-klientelisme, di mana relasi kandidat dan pemilih bersifat transaksional. Selain itu, politik kekerabatan memainkan peran penting dalam menentukan preferensi pemilih, menunjukkan bahwa ikatan sosial dan genealogis lebih dominan dibandingkan pertimbangan rasional atas kapasitas kepemimpinan. Akibatnya, kepemimpinan lokal rentan disalahgunakan demi kepentingan kelompok terbatas, sehingga melemahkan pelayanan publik dan menghambat pembangunan desa. Praktik semacam ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam hukum adat Gayo. Untuk itu, diperlukan strategi komprehensif berupa penguatan lembaga adat dan panitia pemilihan, revitalisasi nilai-nilai lokal dalam demokrasi desa, edukasi politik masyarakat, serta penegakan sanksi terhadap pelaku politik uang. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan proses elektoral yang lebih berintegritas.

REKOMENDASI

Untuk mengatasi permasalahan politik uang dan politik kekerabatan dalam pemilihan Reje Kampung, diperlukan serangkaian langkah strategis yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Pertama, pendidikan politik yang berkelanjutan harus menjadi prioritas, dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan pemahaman politik yang menekankan pentingnya integritas, visi, dan kompetensi calon. Langkah ini bertujuan untuk membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap proses demokrasi yang sehat. Kedua, penguatan regulasi dan penegakan hukum menjadi hal krusial, terutama dalam memastikan bahwa larangan terhadap praktik politik uang ditegakkan secara konsisten. Untuk itu, kapasitas kelembagaan dan sumber daya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) serta aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara efektif. Ketiga, reformasi mekanisme pemilihan juga mendesak untuk dilakukan, dengan merancang model pemilihan yang lebih transparan dan partisipatif, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan keluarga dan kerabat calon dalam struktur panitia atau tim sukses. Keempat, di daerah seperti Aceh yang memiliki sistem sosial berbasis adat yang kuat, lembaga adat perlu dilibatkan secara aktif sebagai pengontrol etika politik dalam proses pemilihan Reje Kampung. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi fondasi demokrasi lokal. Terakhir, transparansi anggaran kampanye harus dijamin melalui sistem pelaporan dana kampanye yang jelas dan dapat diaudit oleh tim independen, guna mencegah transaksi gelap serta penyalahgunaan sumber daya. Dengan implementasi kelima langkah tersebut secara terpadu, diharapkan pemilihan Reje Kampung di masa mendatang dapat berlangsung lebih bersih, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat kampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berbagi pengalaman berharga dalam proses pengumpulan data primer. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan akses terhadap data sekunder yang relevan, baik dari instansi pemerintahan, Reje Kampung, maupun kelompok masyarakat lainnya yang terkait dengan kajian ini. Segala bentuk bantuan yang diberikan murni bersifat kontribusi intelektual dan informasi yang sangat berharga dalam menyelesaikan studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, A. (2021). "Implikasi Politik Uang terhadap Integritas Pemilihan Umum di Tingkat Lokal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 77-92
- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2020). Regional head elections, high-cost politics, and corruption in Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 104–119. <https://doi.org/10.26618/ojip.v10i2.8438>
- Aminuddin, M. F., & Attamimi, N. H. (2018). From retail to grocery: Money politics in 2014 Indonesian legislative election. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1), 45–67. <https://doi.org/10.15294/jpi.v4i1.12609>
- Anjani, N. (2021). Politik Kekerabatan dalam Dinamika Pilkada di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 3(1), 45–56.
- Aspinall, E. (2014). *Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in Local Elections*. NUS Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Southeast Asia: Strong-state democratization and the politics of patronage. *Journal of Democracy*, 25(2), 98–112. <https://doi.org/10.1353/jod.2014.0046>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Berenschot, W. (2018). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Towett, J.K., & Kungu, S.K. (2020). The Implication of Political Patron-Client Linkages on Democratic Governance in Developing Democracies.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hasan, E., Aminah, A., Hamil, H. J., & Mukhrijal, M. (2023). The practice of money politics in village head elections and its effect on the participation level of beginner voters. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 112–125. <https://doi.org/10.18196/gpp.v10i1.15576>
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge University Press.
- Mawaddah, S., & Lubis, R. M. (2020). Pendidikan Politik Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 135–149.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Nurlinah, N., Darwin, R. L., & Haryanto, H. (2019). Incumbency disadvantages and populism in Indonesian local elections: Case studies of Banda Aceh and Takalar. *PCD Journal*, 7(1), 15–31. <https://doi.org/10.22146/pcd.35230>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pierskalla, J.H., & Sacks, A. (2019). Personnel Politics : Elections, Clientelistic Competition and Teacher Hiring in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 50(4), 1283-1305.
- Prihatmoko, D., & Maharani, A. (2021). Politik Dinasti dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 141–156.
- Qulsum, U. (2020). Fenomena Politik Uang dalam Pilkadaes: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(2), 101-118.
- Ramadhani, A. A. (2025). Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 2(1), 76-85. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.79>.
- Robison, R. & Hadiz, V. (2014). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.
- Rusnaedy, Z., Fatma, F., & Haris, A. M. (2022). Political dynasty and single candidate in Indonesian local elections: Where are the parties?. *Journal of Governance and Local Politics*, 3(2), 123–138. <https://doi.org/10.55199/jglp.v3i2.297>
- Simatupang, J., & Subekhan, M. (2018). The influence of money political culture in elections on the sustainability of Indonesian democracy. *Law Research Review Quarterly*, 4(4), 1297–1312. <https://doi.org/10.15294/snh.v4i4.27028>
- Tapsell, R. (2022). *Democracy, money and power in local Indonesian elections*. *Journal of Contemporary Asia*, 52(1), 1–18.
- Virananda, I. G. S., Dartanto, T., & Wijaya, B. D. (2021). Does money matter for electability? Lesson learned from the 2014 legislative election in Indonesia. *SAGE Open*, 11(4), 1–11. <https://doi.org/10.1177/21582440211054492>
- Winters, J. (2014). Oligarchy and Democracy in Indonesia. Dalam M. Ford & T. Pepinsky (Eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power and Contemporary Indonesian Politics* (hlm. 11-33). Cornell University Press.